

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Secara global keluarga berencana diakui sebagai strategi esensial dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, kesetaraan gender, dan pengurangan kemiskinan. Akses universal terhadap pelayanan KB yang berkualitas merupakan hak asasi manusia dan investasi yang sangat penting untuk pembangunan sosial ekonomi (Andriani et al., 2021).

Namun, tantangan global terkait KB masih signifikan. Data terkini pada tahun 2024 dari *World Health Organization* (WHO) menunjukkan bahwa dari 1,9 miliar wanita usia reproduksi (15-49 tahun), 1,1 miliar memerlukan layanan keluarga berencana. Dari jumlah tersebut, 874 juta menggunakan metode kontrasepsi modern, sementara 164 juta lainnya memiliki kebutuhan kontrasepsi yang belum terpenuhi (WHO, 2024).

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2024 di Indonesia, terdapat peningkatan penggunaan alat kontrasepsi, baik modern maupun tradisional, di kalangan Pasangan Usia Subur usia 15-49 tahun antara 2022 dan 2024, dengan 56,26% PUS di Indonesia menggunakan alat KB atau cara tradisional pada tahun 2024. Penggunaan alat KB atau cara tradisional lebih umum dijumpai di daerah pedesaan (59,68%) dibandingkan perkotaan (53,71%) dan lebih tinggi pada PUS dengan kuintil pengeluaran rumah tangga terendah. Suntikan merupakan jenis kontrasepsi yang paling banyak digunakan

(53%), diikuti pil KB (18,11%) dan susuk KB/implan (11,72%), sementara 1,49% PUS masih menggunakan metode tradisional seperti pantang berkala (BPS, 2024).

Indonesia menunjukkan tren positif dalam cakupan KB pasca persalinan (0–42 hari) sepanjang 2023–2024. Menurut BKKBN, prevalensi penggunaan kontrasepsi selama 42 hari pascapersalinan tercatat sebesar 71 %, menjadikan Indonesia tertinggi di antara negara berkembang. Meski terjadi penurunan dari 30,23 % pada 2021 ke 18,44 % di 2022, tingkat tersebut melonjak menjadi 49,1 % pada 2023, dan dipacu menuju target ambisius sebesar 70 % pada 2024. (Antara, 2023; Baskoro, 2024).

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), salah satu tantangan dalam pelaksanaan KB pasca persalinan adalah rendahnya pengetahuan ibu nifas tentang pilihan metode yang tersedia dan waktu yang tepat untuk menggunakannya. Strategi BKKBN yang intensif termasuk mewajibkan setiap ibu mendapatkan penawaran KB sebelum keluar dari fasilitas kesehatan, serta pemanfaatan media sosial dan peran bidan sebagai agen edukasi utama, diyakini menjadi pendorong utama pencapaian ini (BKKBN, 2023).

Di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, penggunaan alat kontrasepsi menunjukkan variasi yang signifikan. Dari 15820 jumlah akseptor KB, suntikan menjadi metode yang paling banyak digunakan dengan jumlah 8.336 (52,70%) akseptor. Pil KB juga cukup populer dengan 3.743 (23,66%) akseptor. Implan menempati urutan ketiga dengan 1.434 (9,06%) akseptor, diikuti oleh IUD 1.033 (6,53%) akseptor dan kondom 636 (4,02%) akseptor.

Metode kontrasepsi mantap seperti MOW 629 (3,98%) akseptor dan MOP 9 (0,06%) akseptor memiliki jumlah pengguna yang relatif lebih rendah. Data ini mencerminkan preferensi masyarakat terhadap metode kontrasepsi jangka pendek seperti suntikan dan pil, meskipun metode jangka panjang seperti IUD dan implan juga memiliki pengguna yang cukup signifikan (BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2024).

UPTD Puskesmas Tanjung Palas sebagai fasilitas kesehatan primer yang bertanggung jawab menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) bidang KIA-KB, termasuk konseling dan pemasangan KB pasca persalinan. Pada tahun 2024, jumlah peserta KB pasca persalinan di Puskesmas Tanjung Palas tercatat sebanyak 125 orang. Rincian penggunaan metode kontrasepsi adalah sebagai berikut : kondom sebanyak 18 orang (14.4%), pil sebanyak 4 orang (3.2%), suntik sebanyak 57 orang (45.6%), AKDR sebanyak 6 orang (4.8%), implan sebanyak 35 orang (28%), dan MOW sebanyak 5 orang (4%) (UPTD Puskesmas Tanjung Palas, 2025).

KB pasca persalinan merupakan periode penting dalam kehidupan reproduksi wanita, menawarkan kesempatan unik untuk memulai atau melanjutkan kontrasepsi setelah melahirkan. KB pasca persalinan, yang idealnya dimulai dalam 48 jam setelah persalinan dan berlangsung hingga 12 bulan pasca persalinan, memainkan peran penting dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak (Kusuma et al., 2022; Mawarni et al., 2020)

Ibu nifas disarankan untuk menggunakan metode kontrasepsi karena pada masa ini risiko kehamilan kembali cukup tinggi, bahkan sebelum menstruasi pertama terjadi. Kehamilan yang terlalu dekat dengan persalinan

sebelumnya dapat meningkatkan risiko komplikasi seperti anemia, kelahiran prematur, dan bayi dengan berat lahir rendah. Selain itu, penggunaan KB pasca persalinan memberikan waktu bagi tubuh ibu untuk pulih secara fisik dan mental, serta memungkinkan pemberian ASI eksklusif secara optimal tanpa gangguan akibat kehamilan yang tidak direncanakan (Kemenkes RI, 2024; WHO, 2022).

Keputusan ibu dalam menggunakan KB pasca persalinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kemudahan akses, kepraktisan, serta pengaruh lingkungan yang cenderung memilih kontrasepsi suntik. IUD kurang diminati karena dianggap menakutkan dan memalukan saat pemasangan. Selain itu, kekhawatiran akan gangguan ASI, keinginan segera kembali berhubungan seksual, dan kurangnya pengetahuan tentang kontrasepsi jangka panjang turut menjadi hambatan dalam pemanfaatan KB pasca persalinan (Sunesni et al., 2023).

Pengetahuan ibu nifas tentang KB sangat memengaruhi partisipasi mereka dalam program KB pascapersalinan (Anis et al., 2022). Informasi yang akurat dan komprehensif memungkinkan ibu untuk membuat keputusan yang tepat mengenai pilihan kontrasepsi mereka. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan dapat menyebabkan kebingungan dan penolakan terhadap metode kontrasepsi (Muthoharoh, 2021).

Berbagai studi menunjukkan bahwa pengetahuan ibu tentang metode kontrasepsi memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan KB pascapersalinan (Mekonnen et al., 2021). Partisipasi ibu dalam program KB berkorelasi positif dengan pengetahuan mereka. Namun, ada

berbagai hambatan di lapangan, termasuk akses informasi yang terbatas, tingkat pendidikan yang rendah, norma budaya, dan pengaruh sosial yang memengaruhi keputusan ibu (Rahmadhani, 2020; Riyani, 2020).

UPTD Puskesmas Tanjung Palas pada tahun 2025 menargetkan cakupan pelayanan KB pascalin sebesar 70% dari total sasaran ibu bersalin yang berjumlah 228 orang, atau sekitar 160 ibu nifas yang diharapkan menggunakan metode kontrasepsi setelah melahirkan. Target ini sejalan dengan upaya peningkatan akses dan pemanfaatan layanan kesehatan reproduksi yang bertujuan untuk menurunkan angka kehamilan yang tidak direncanakan serta mendukung program Keluarga Berencana Nasional. Namun, pencapaian target tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan kesadaran ibu nifas terhadap pentingnya KB pascalin, sehingga dibutuhkan strategi edukasi dan konseling yang lebih efektif sejak masa kehamilan hingga setelah persalinan (Puskesmas Tanjung Palas, 2025).

Hasil studi pendahuluan dilakukan pada bulan Juni 2025 di UPTD Puskesmas Tanjung Palas terhadap 7 ibu nifas yang sedang melakukan kunjungan pelayanan pasca persalinan, untuk mengetahui gambaran awal tingkat pengetahuan tentang penggunaan metode kontrasepsi pasca salin. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebanyak 4 ibu tidak mengetahui waktu penggunaan KB, 5 ibu tidak mengenal jenis KB pascalin, dan 6 ibu belum pernah menerima edukasi dari tenaga kesehatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengetahuan ibu nifas tentang KB pascalin di UPTD Puskesmas Tanjung Palas masih rendah, dan pelayanan konseling KB belum dilakukan secara optimal, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk

menggambarkan secara menyeluruh tingkat pengetahuan ibu nifas guna mendukung perencanaan peningkatan pelayanan KB pascapersalinan.

Pengetahuan dipilih sebagai variabel utama dalam penelitian ini karena merupakan faktor kunci yang memengaruhi perilaku dan pengambilan keputusan kesehatan. Pengetahuan ibu nifas tentang KB memengaruhi partisipasi dalam program KB pascasalin. Pemahaman yang baik tentang kontrasepsi sangat penting untuk mengambil keputusan yang tepat setelah melahirkan demi kesehatan ibu dan anak. Kurangnya pengetahuan tentang pilihan kontrasepsi dapat menghambat keterlibatan ibu dalam program KB pascasalin, yang penting untuk mengatur jarak kelahiran, mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, dan meningkatkan kesehatan ibu serta anak (Munawar & Renggina, 2021; Podesta & Ropea, 2019; Widowati & Damayanti, 2022).

Selain itu, dalam beberapa budaya lokal yang ada di kabupaten bulungan, terdapat kepercayaan atau mitos tertentu terkait masa nifas dan kontrasepsi, yang juga dapat mempengaruhi penerimaan ibu terhadap penggunaan metode KB. Pemahaman budaya lokal ini penting untuk didekati dengan strategi komunikasi yang tepat agar tidak terjadi penolakan terhadap program KB pasca persalinan.

Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam melalui penelitian ini dengan judul “Gambaran Pengetahuan Ibu Nifas tentang Metode KB Pasca Persalinan di UPTD Puskesmas Tanjung Palas” untuk mengukur tingkat pengetahuan ibu nifas terhadap partisipasi mereka dalam program KB. Tingkat pengetahuan yang rendah berpotensi menghambat efektivitas program KB,

sementara pemahaman yang memadai diharapkan dapat meningkatkan partisipasi, yang pada gilirannya mendukung pengendalian angka kelahiran dan peningkatan kualitas hidup keluarga.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana gambaran pengetahuan ibu nifas tentang metode KB pasca persalinan di UPTD Puskesmas Tanjung Palas?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui mengenai gambaran pengetahuan ibu nifas tentang metode KB pasca persalinan di UPTD Puskesmas Tanjung Palas Provinsi Kalimantan Utara

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui karakteristik ibu nifas berdasarkan umur, dan pendidikan, dan paritas di UPTD Puskesmas Tanjung Palas Provinsi Kalimantan Utara.
- b. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu nifas tentang metode KB Pasca Persalinan di UPTD Puskesmas Tanjung Palas Provinsi Kalimantan Utara.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang kebidanan dan kesehatan masyarakat, khususnya mengenai aspek pengetahuan ibu nifas terhadap penggunaan kontrasepsi pasca persalinan. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan edukasi KB dan kesehatan reproduksi.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Tenaga Kesehatan

Memberikan informasi bagi tenaga kesehatan dan pengelola program KB dalam merancang intervensi yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

b. Sebagai bahan masukan bagi pengembangan kebijakan terkait program KB pascapersalinan.

c. Sebagai informasi tambahan bagi ibu nifas dan keluarga mengenai pentingnya pengetahuan tentang KB dalam merencanakan keluarga.